

## Pemilu dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan dan Keagamaan

**Khoirunnisa**

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: [khoirunnisa@uta45jakarta.ac.id](mailto:khoirunnisa@uta45jakarta.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dilema yang muncul dalam konteks politik identitas terkait pemilu di Indonesia. Munculnya perdebatan yang menghubungkan isu agama dan politik dalam pemilu, juga untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi antara konsepsi kebangsaan dan keagamaan dalam pemilu di Indonesia. Terutama yang terkait dengan Politik identitas yang telah mempengaruhi panggung politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk memahami realita politik identitas di Indonesia saat ini dengan fokus pada dua kelompok identitas utama, yaitu kelompok keagamaan dan kelompok nasionalis. Metode pendekatan yuridis normatif, dengan studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber seperti tulisan ataupun artikel ilmiah baik berbentuk buku, media online, disertasi ataupun literatur yang lain merupakan metode yang dipilih dalam penulisan artikel ini. Hasil dari kajian menemukan bahwa polarisasi politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme menyebabkan gangguan terhadap stabilitas negara. Namun keberadaan politik identitas bukanlah menjadi faktor utama penyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, tapi merupakan pondasi penting dalam membangun identitas nasionalisme bangsa

**Keywords:** *Politik Identitas, Keagamaan, Kebangsaan, Nasionalis.*

### ABSTRACT

*This article analyzes the dilemma that arises in the context of identity politics related to elections in Indonesia. The emergence of debates linking religion and politics in elections is examined, along with an analysis of the challenges faced between nationalism and religious identity in Indonesian elections. The article specifically focuses on the impact of identity politics on Indonesia's political landscape in recent years. The main objective is to understand the current reality of identity politics in Indonesia, with a specific focus on two main identity groups: religious and nationalist. This research employs a normative juridical approach, utilizing literature study from various sources, including books, online media, dissertations, and other relevant literature. The findings reveal that political polarization based on religious and nationalist identities poses a threat to the stability of the country. However, it is crucial to note that the existence of identity in politics is not the primary factor contributing to the destruction of national integrity in Indonesia. On the contrary, it plays a significant role in building the foundation of the nation's identity and nationalism.*

**Keywords:** *Identity Politics, Nationalism, National, Religion*

## PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia terus menghadapi tantangan yang timbul dari keanekaragaman masyarakatnya. Keanekaragaman ini seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok. Perbedaan-perbedaan berdasarkan keragaman di Indonesia telah mencatatkan sejarah sebagai faktor utama dalam munculnya berbagai konflik, termasuk konflik antar agama, antar etnis, antar suku, dan lain sebagainya.

Sistem demokrasi di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan beragam pandangan dan kepentingan, namun pada saat yang sama, ini juga menimbulkan kompleksitas dalam menangani perbedaan yang ada. Berbagai identitas yang berbeda, seperti agama, etnis, suku, dan lain-lain, sering kali saling bersaing dan bertabrakan dalam kompetisi politik.

Fitri Ramdhani Harahap dalam kajiannya mengenai Politik Identitas Berbasis Agama (Harahap, 2014), menyatakan bahwa politik identitas berbasis agama di Indonesia mengancam kemajemukan identitas di Indonesia dan integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan. Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan. Meskipun kajian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan kajian Fitri Ramdhani Harahap, namun terdapat perbedaan dalam substansi keberadaan politik identitas keagamaan. Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis, politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini.

Sementara Ahmad Syafii Maarif kajiannya yang berjudul "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia" (Syafii Maarif, 2013), menyatakan bahwa politik identitas di Indonesia lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, suku, dan

kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Politik identitas yang mengatasnamakan agama (Islam) dianggap membahayakan posisi nasionalisme dan keberagaman Indonesia. Seharusnya, Pancasila diusung sebagai prinsip dasar bersama bagi Indonesia, yang menghargai setiap perbedaan seperti etnis, bahasa lokal, agama, dan latar belakang sejarah. Identitas agama (Islam) tidak mencakup kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Persamaan antara penelitian penulis dan Ahmad Syafii Maarif terletak pada pembahasan politik identitas terhadap rasa nasionalisme bangsa. Namun, perbedaan terletak pada pokok pembahasan mengenai agama (Islam) yang dianggap oleh Maarif sebagai ancaman bagi keberagaman di Indonesia, sementara dalam kajian penulis, identitas agama (Islam) merupakan pondasi identitas nasionalisme bangsa Indonesia

Permasalahan yang timbul akibat konflik antar identitas di Indonesia semakin kompleks dengan kehadiran kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh seluruh masyarakat. Kelompok nasionalis ini berpendapat bahwa masyarakat Indonesia harus menghargai dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari identitas negara yang telah diakui sejak kemerdekaannya. Namun, kelompok nasionalis ini juga terdiri dari berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dan lain-lain. Ironisnya, kelompok ini menjadi semakin solid dalam menegaskan arah politik identitasnya.

Sikap tegas dan kuat dari kelompok nasionalis tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Namun, kekompakan kelompok nasionalis ini juga dapat menyulitkan upaya mencapai kesepakatan dan konsensus dalam menangani perbedaan di masyarakat.

Perjuangan kelompok nasionalis untuk menegaskan arah politik identitasnya sering kali berdampak pada penegasan kepentingan dan hak kelompoknya, namun pada saat yang sama juga bisa mengabaikan perspektif dan kebutuhan kelompok lain. Hal ini menyebabkan potensi polarisasi semakin meningkat dan menghambat upaya membangun persatuan di tengah-tengah kebhinekaan.

Sebagai sebuah negara dengan beragam identitas, penting untuk mengenali keberadaan kelompok nasionalis ini sebagai bagian dari dinamika politik dan sosial.

Namun, di saat yang sama, penting juga untuk mempromosikan dialog dan komunikasi yang konstruktif antara berbagai kelompok identitas, agar upaya mencapai keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat bisa lebih berhasil.

Persoalan yang semakin memuncak di Indonesia adalah benturan antara identitas nasionalisme dan identitas agama, yang berdampak pada stabilitas negara. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik dari kedua kelompok ini telah menciptakan isu-isu yang memperpecah masyarakat secara menyeluruh. Propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakini semakin memperkeruh situasi dan bahkan menyebabkan terbentuknya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah.

Perbedaan pandangan mengenai identitas nasionalisme dan identitas agama telah menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Kelompok nasionalis mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menganggap identitas nasional sebagai faktor utama yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai stabilitas negara. Sementara itu, kelompok agama menekankan pentingnya identitas agama sebagai landasan moral dan spiritual bagi masyarakat.

Pentingnya mengkaji perbedaan politik identitas di Indonesia terletak pada usaha untuk memahami inti dari perbedaan tersebut, guna memastikan tetap terjaganya stabilitas politik. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari masa kemerdekaannya hingga saat ini bahwa kesatuan dapat dipertahankan.

Politik identitas tidak dapat dipisahkan dari makna identitas itu sendiri. Identitas atau jati diri dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Dalam politik identitas, identitas dipolitisasi melalui interpretasi yang ekstrim, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa memiliki kesamaan, baik itu berdasarkan ras, etnisitas, agama, atau elemen perekat lainnya. Politik identitas dapat berfokus pada perbedaan fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi

resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama dalam mengkomodifikasi kepentingan minoritas (Suparlan, 2014).

Politik identitas dapat menjadi sarana bagi kelompok-kelompok minoritas atau marginal dalam masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, di sisi lain, politik identitas juga dapat menyebabkan polarisasi dan konflik dalam masyarakat jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Peran politik identitas dalam persoalan kenegaraan menjadi kompleks dan penting untuk diperhatikan dalam konteks demokrasi dan pembangunan negara yang inklusif. Pemerintah dan masyarakat perlu mencari cara-cara yang konstruktif untuk mengatasi ketidakpuasan dan kekhawatiran kelompok-kelompok identitas tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Politik identitas telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, terutama di Amerika Serikat, yang pertama kali muncul terkait dengan adanya diskriminasi yang sangat jelas antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Perlakuan kasar, pemerasan, dan intimidasi yang dialami oleh warga kulit hitam di Amerika telah mendorong pentingnya politik identitas sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks penguasaan negara dan pemerintah.

Politik identitas dalam konteks dinamika politik di Indonesia sering kali berasal dari rasa ketidakadilan dan perbedaan hak yang dirasakan oleh kelompok atau golongan sosial tertentu. Ketidakpuasan terhadap perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat dapat memicu munculnya politik identitas sebagai usaha untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok tersebut.

Di samping itu, keberagaman di Indonesia menjadi faktor utama yang memperkuat peran politik identitas. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, menciptakan lingkungan politik yang rumit, di mana kelompok-kelompok identitas berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Politik identitas yang mempertegas perbedaan ini dapat berdampak negatif pada stabilitas negara. Jika konflik yang dilatarbelakangi oleh politik

identitas dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang tepat, dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat dan merusak kohesi sosial.

Menurut Haboddin dalam kajian politik, terdapat perbedaan antara "identitas politik" (political identity) dan "politik identitas" (politics of identity) (Haboddin, 2013) :

**Identitas Politik (Political Identity):** Merujuk pada konstruksi identitas yang menentukan posisi dan kepentingan subjek dalam ikatan suatu komunitas politik. Dalam konteks ini, identitas politik berkaitan dengan cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam lingkungan politik. Identitas politik mencakup faktor-faktor seperti keyakinan politik, pandangan ideologis, afiliasi partai, dan dukungan terhadap seorang pemimpin atau kelompok politik tertentu. Identitas politik dapat berfungsi sebagai pemersatu dan pembeda dalam masyarakat politik.

**Politik Identitas (Politics of Identity):** Merujuk pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik identitas politik maupun identitas sosial, sebagai sumber dan sarana politik. Dalam konteks ini, politik identitas berarti bagaimana identitas kelompok tertentu digunakan dan dimanipulasi dalam arena politik untuk mencapai tujuan tertentu. Politik identitas mencakup strategi politik yang melibatkan pemobilisasi dan penguatan identitas kelompok untuk menggalang dukungan, memenangkan pemilu, atau mengajukan tuntutan politik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa identitas politik dan politik identitas merupakan dua aspek yang terkait dalam politik, tetapi memiliki fokus dan implikasi yang berbeda. Identitas politik mengacu pada bagaimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam lingkungan politik, sementara politik identitas berbicara tentang bagaimana identitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam realitas politik, politik identitas seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik dan interaksi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam kajian politik identitas, terdapat tiga kategori identitas yang diakui, yaitu identitas sosial dan identitas agama (Harahap, 2014):

1. Identitas Sosial: Meliputi identitas keagamaan, kelas sosial, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Identitas sosial menentukan posisi individu dalam relasi atau interaksi sosialnya. Faktor-faktor identitas sosial ini dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok berperilaku, memandang dunia, dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat.
2. Identitas Politik: Meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan. Identitas politik menentukan posisi individu dalam sebuah komunitas melalui rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap identitas nasional atau negara, serta sekaligus menandai posisi subjek yang lain dalam pembedaan (sense of otherness). Identitas politik ini memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran sebagai warga negara, membangun solidaritas, dan mengenali diri sebagai bagian dari entitas politik yang lebih besar.

Dalam konteks politik identitas, persoalan identitas sosial dan politik ini seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan. Partai politik atau kelompok politik tertentu dapat memanfaatkan identitas sosial atau politik untuk memobilisasi dukungan pemilih, membentuk koalisi politik, atau meraih keunggulan dalam pemilihan umum.

Penting untuk diingat bahwa politik identitas dapat memiliki dampak yang kompleks dalam dinamika politik suatu negara. Penggunaan identitas sosial dan politik sebagai alat politik harus dilakukan dengan tanggung jawab dan penuh kesadaran akan implikasinya terhadap stabilitas sosial dan persatuan nasional. Penting juga untuk mencari cara-cara yang inklusif dan menghargai keberagaman dalam politik, sehingga dapat menciptakan lingkungan politik yang harmonis dan berkeadaban.

Politik identitas dapat diartikan sebagai alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok, seperti kelompok etnis, suku, budaya, agama, atau kelompok lainnya, untuk mencapai tujuan tertentu. Identitas dalam konteks politik identitas merujuk pada pengakuan terhadap individu atau kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh, yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu (Area, n.d.).

Dalam politik identitas, identitas dipolitisasi melalui interpretasi yang ekstrim, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa memiliki kesamaan, baik itu berdasarkan ras, etnisitas, agama, atau elemen perekat lainnya. Politik identitas dapat berfokus pada perbedaan fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama dalam mengakomodir kepentingan minoritas (Wikipedia, 2023).

Dalam politik identitas di Indonesia, terdapat dua kelompok yang sering diperdebatkan, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agamis (UMM, n.d.). Politik identitas dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap bangsa dan negara, baik dalam membentuk persatuan maupun memecah belah masyarakat (UMM, n.d.)

Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas berbasis agama menjadi dominan dalam wacana politik identitas di Indonesia, hal ini terlihat dalam peristiwa Pilkada DKI 2017 dan pilpres 2019 (Nasrudin, 2018), di mana terjadi mobilisasi identitas agama dalam kontestasi politik politik identitas berbasis agama ini mencerminkan kecemasan terhadap dampak mobilisasi identitas agama terhadap disintegrasi bangsa, namun, politik identitas di Indonesia juga dapat terjadi dalam bentuk lain yang juga memiliki dampak serius terhadap disintegrasi bangsa (Unair, n.d.)

Penting untuk memahami bahwa identitas merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan politik. Namun, politik identitas juga dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman dan menjaga persatuan dalam perbedaan.

Demokrasi di Indonesia terus mengalami dinamika dengan adanya keanekaragaman yang seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok. Perbedaan berdasarkan keragaman di Indonesia telah mencatatkan sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku, dan sebagainya. Namun, keberagaman juga dapat menjadi modal yang baik bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.



Politik identitas yang memanfaatkan perbedaan agama, suku, atau etnis sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola isu-isu politik identitas dengan bijak dan mempromosikan dialog yang inklusif. Demokrasi di Indonesia juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak monolitik. Terdapat berbagai bentuk demokrasi yang dapat berkembang sesuai dengan konteks dan keberagaman masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya menyatukan keberagaman dalam sebuah sistem demokratis.

Dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang penting. Dengan partisipasi yang aktif dari berbagai kelompok masyarakat, pemilu dapat menjadi wahana untuk menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia, perlu adanya upaya yang terus menerus untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang kaya, seringkali menghadapi potensi konflik terkait relasi antara agama dan negara. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara telah terjadi sejak lama, seperti yang pernah diperdebatkan oleh Soekarno dan Muhammad Natsir terkait negara Republik Turki dan pemisahan agama dan Negara (Sari, 2016).

Implementasi sikap toleransi harus atas dasar kelapangan dada terhadap orang lain yang memfokuskan perhatian kepada prinsip-prinsip yang dipegang oleh individu tanpa mengorbankan prinsip orang lain yang berbeda (Bowie, 2019)

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan tersebut, penulis membuat rumusan masalah Bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi integritas nasional bangsa Indonesia secara keseluruhan?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian dengan mengambil beberapa referensi baik per-undang-undangan, jurnal, buku, berita online dan lain-lainnya atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan dengan tetap memperhatikan faktor pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Politik Identitas Dan Keutuhan NKRI**

Menurut Syafii Ma'arif dalam bukunya "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia", Politik Identitas di Indonesia terutama berkaitan dengan hal-hal seperti etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili oleh elit politik dengan cara yang berbeda-beda (Syafii Maarif, 2013). Salah satu bentuk Politik Identitas ini dapat terlihat dalam gerakan pemekaran daerah. Isu-isu yang berhubungan dengan keadilan dan pembangunan daerah menjadi fokus utama dalam perdebatan politik mereka, namun sering kali dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk mencari posisi kepemimpinan. Hal ini merupakan masalah kompleks yang sulit dijelaskan dengan mudah.

Solahuddin Wahid dalam tulisannya berjudul "Keindonesiaan dan Ke-Islaman" (Wahid, 2017), menyatakan bahwa ada potensi perluasan konflik antara keindonesiaan dan keislaman pada Pilkada 2018. Apabila konflik semacam itu masih berlanjut hingga Pilpres 2019, maka persatuan Indonesia dapat terancam. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menenangkan ketegangan tersebut. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan dialog antarkelompok di dalam Islam dan juga dengan kelompok agama lain untuk menenangkan situasi. Dalam dialog ini, perlu membahas secara mendalam tentang arti dari "politisasi agama" dan juga apa yang dimaksud dengan "isu SARA" (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penting bagi dialog tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan pikiran yang jernih agar mencapai kesepakatan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu saja, proses ini memerlukan waktu yang cukup untuk meredakan suasana dan mencapai pemahaman yang baik.

Atas dasar pandangan tersebut, Muhtadi (Muhtadi, 2019) menyatakan bahwa fenomena Politik Identitas yang diusung dalam populisme Islam dapat menjadi ancaman bagi demokrasi jika dikelola oleh para pemimpin dan politisi yang tidak berani melawan arus. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, populisme semacam itu bisa berubah menjadi "racun" yang perlahan-lahan akan merusak demokrasi. Populisme tidak lagi menjadi "pemanis" bagi demokrasi, seperti yang sebelumnya dianggap oleh orang-orang yang tidak memahami bahaya dan ancaman Politik Identitas terhadap keberlangsungan dan integritas bangsa serta negara Indonesia.

Berdasarkan analisis peranan agama dalam membentuk hubungan sosial, Haryatmoko (Haryatmoko, 2010), berpendapat bahwa agama dalam membentuk identitas membantu para pemeluknya merasa memiliki kedudukan dalam kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, cara berpikir, dan etos bagi individu. Dalam konteks ini, konflik pribadi dapat berubah menjadi konflik agama karena identitas agama menjadi bagian tak terpisahkan dari harga diri, martabat, dan kebanggaan seseorang.

Peranan agama sebagai representasi diri semakin diperkuat oleh tekanan ideologi, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menggalang dukungan dalam membela kepentingan kelompok. Namun, H. Arendt memperingatkan tentang bahaya mengubah agama menjadi ideologi dan menggunakannya dengan fanatisme. Fanatisme dianggap sebagai musuh besar kebebasan, dan perlu dihindari agar usaha melawan totalitarisme tidak tercemar oleh tindakan yang ekstrem dan dogmatis (Arendt, 1998).

Sejalan dengan di atas, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya waspada terhadap "disfungsi agama" (Umar, 2019), yang mencakup beberapa hal seperti usaha-upaya desakralisasi agama, yaitu usaha untuk menghilangkan kesakralan dan nilai-nilai suci agama. Selain itu, disfungsi agama juga terlihat ketika peran agama melemah, yang ditandai dengan beberapa hal berikut: agama hanya hadir pada sektor hilir, agama kehilangan semangat juang (jihad), agama tidak lagi memberikan pencerahan, agama

kehilangan fungsi kritis, pemikiran agama mengalami stagnasi, dan pertimbangan agama menjadi semakin terpinggirkan.

Di Indonesia pasca reformasi, terjadi fenomena yang mengejutkan dan bahkan tak terduga dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Seperti yang diuraikan dalam penelitian "Politik Identitas dan Kenikmatan dalam Budaya Layar Mutakhir di Indonesia" oleh Ariel Heryanto (Heryanto, n.d.), mayoritas penduduk Indonesia, terutama kelas menengah muda di perkotaan, sedang berusaha untuk memperbarui identitas mereka. Masa ini merupakan periode yang kompleks, penuh dengan harapan akan kebebasan, namun juga diwarnai oleh rasa ketakutan yang serupa.

Beberapa aspek yang mencirikan periode ini antara lain meningkatnya politik Islami dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, perdebatan publik mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, perpecahan berkelanjutan dan sulit diredam di kalangan elit politik, pertumbuhan kekuatan ekonomi Asia, dan munculnya revolusi komunikasi digital yang disambut dengan antusiasme oleh generasi muda di seluruh dunia.

Masalah muncul ketika politik identitas menjadi sangat diperkuat dan dimanipulasi untuk mencapai tujuan politik sambil menciptakan konflik dengan identitas kelompok lain. Hal ini menjadi permasalahan karena kita hidup dalam masyarakat yang beragam dan tidak dapat dihindari. Selain itu, kita tidak hidup dalam logika zero sum, di mana keuntungan satu kelompok berarti kerugian bagi kelompok lain, seperti yang seringkali terjadi dalam politik yang tertutup. Politik identitas yang berbahaya adalah ketika rasionalitas terabaikan, dan hal ini dapat menghasilkan konsekuensi berantai, termasuk kebijakan yang tidak tepat atau hanya bersifat populis.

Dalam tulisannya berjudul "Salah Urus Negara dan Rapuhnya Keindonesiaan," Syamsuddin Haris secara tegas menggambarkan bahaya disintegrasi bangsa. Menurutnya, potensi konflik dan disintegrasi memiliki akar pada kecenderungan elit politik di hampir semua tingkat untuk memanipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Potensi disintegrasi tersebut muncul ketika elite politik, terutama elite birokrasi negara (sipil dan militer), memanipulasi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok sebagai kepentingan "nasional," serta menyalahgunakan otoritas negara

untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan semacam itu. Fenomena ini tampaknya lebih relevan dalam melihat berbagai kasus empiris yang terkait dengan isu integrasi selama periode Orde Baru dan potensi disintegrasi di era pasca-Orde Baru. Akibat manipulasi yang terus menerus dilakukan oleh negara, kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkembang menjadi kerusuhan berbau rasial (anti-Cina). Di Ambon dan Maluku pada umumnya, konflik diperparah oleh isu agama yang sangat sensitif, sehingga menyebabkan konflik horizontal yang dipicu oleh beragam faktor, seperti isu representasi Islam-Kristen dalam struktur birokrasi setempat dan kesenjangan sosial-ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. Selain itu, di Sambas, Kalimantan Barat, konflik etnik antara suku Madura dengan Melayu dan Dayak juga berkaitan dengan masalah kesenjangan sosial-ekonomi di antara kelompok etnik tersebut (Haris, n.d.).

## **2. Agama dan Nasionalisme di Indonesia**

Politik identitas di Indonesia saat ini ditandai dengan berbagai isu yang mencerminkan pertentangan antara kelompok yang mengusung identitas nasionalisme dan kelompok yang mengusung identitas agama. Dalam permasalahan ini, terjadi klaim kebenaran yang saling bersaing antara kedua kelompok mengenai keunggulan atau eksklusivisme dari masing-masing identitas yang mereka dukung. Jika dilihat lebih dalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia telah membuktikan bahwa landasan keagamaan (Islam) memberikan kontribusi besar bagi pembentukan bangsa Indonesia (Parmudi, 2014), termasuk dalam pembentukan dan penerimaan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun, sayangnya, perebutan kekuasaan politik kini kembali mengulangi sejarah kelam dengan menggunakan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda untuk mendapatkan kekuasaan.

Masalah nasionalisme sebelumnya telah diartikan sebagai semangat bersatu antara suku, agama, ras, kelas, dan lain-lain di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan, menciptakan integrasi harmonis, hingga mencapai kemerdekaan Indonesia melalui kerjasama antara beragam kelompok tersebut. Namun, saat ini, nasionalisme lebih sering dipandang sebagai solidaritas nasional dari kelompok minoritas yang merasa terintimidasi oleh kelompok agama mayoritas.

Perpecahan dalam politik identitas di Indonesia saat ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang digerakkan oleh elit politik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik identitas di Indonesia. Perpecahan antara kelompok nasionalis dan agama dianggap sebagai peluang untuk menutupi ketidakmampuan pemerintahan yang berkuasa saat ini dalam menangani isu-isu negara, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Perdebatan mengenai relasi agama dan negara terus menjadi topik yang tak kunjung berakhir. Diskusi tentang hubungan antara agama dan negara terus berlangsung, melibatkan politikus, akademisi, dan masyarakat umum, seolah-olah ini merupakan perbincangan yang baru muncul akhir-akhir ini. Namun, sebenarnya perdebatan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Diskusi ini lebih jauh berkembang menjadi pertentangan antara agama dan nasionalisme, terutama di kalangan umat Islam Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai nasionalisme yang berasal dari Barat menjadi salah satu penyebab utama pertentangan ini.

Ada kalangan umat Islam yang menerima nasionalisme, ada yang menolak, dan ada juga yang netral. Bagi kalangan Muslim yang menolak, mereka menganggap nasionalisme sebagai paham sekuler yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara bagi yang menerima, nasionalisme dianggap sebagai energi positif selama diikuti dengan konsep Ukhuwah Islam yang mempersatukan seluruh bangsa. Ada juga kalangan Muslim yang cenderung netral dan apriori, karena mereka melihat praktik nasionalisme sekuler sebagai sesuatu yang dapat disesuaikan dengan budaya, entitas, dan letak geografis suatu negara. Namun, pandangan tersebut tidak selalu berlaku untuk Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan antara agama dan nasionalisme tidak selalu sejalan. Namun, jika keduanya dapat diintegrasikan dengan baik, akan tercipta kekuatan yang kuat, bahkan dianggap bahwa tegaknya nasionalisme berarti tegaknya jihad. Dalam konteks sejarah, nasionalisme pertama kali muncul di daratan Eropa pada abad ke-15 Masehi, dengan tujuan untuk mempersatukan negara-negara Eropa sambil memecah belah umat Islam yang tersebar di berbagai

negara dengan memanfaatkan konsep perbedaan ras, bahasa, dan tujuan untuk melemahkan umat Islam (Shadily, n.d.), realitas yang ada memang bisa berubah seiring waktu dan perkembangan politik global dan lokal. Melalui nasionalisme, umat Islam dapat merasa disadarkan untuk bangkit dari kungkungan penjajahan kaum imperialis Barat. Sebagai contoh, perjuangan kemerdekaan Indonesia berhasil diperoleh melalui semangat nasionalisme kebangsaan, yang menggalang persatuan dan semangat juang rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun, di tengah perkembangan politik global dan lokal yang terus berubah, pergolakan antara agama dan nasionalisme kembali menguat. Dalam tatanan politik global, terdapat fenomena kebangkitan kelompok 'kebangkitan agama' (religious revival) pada akhir tahun 1980-an. Di Amerika, terjadi kebangkitan kelompok Protestan, di India ada kebangkitan kelompok Hindu, dan di Asia Tenggara khususnya di Thailand dan Sri Lanka muncul kebangkitan kelompok Buddha (Azra, 2016).

Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini mengenai nasionalisme dan agama harus dipertimbangkan secara kritis dan tidak boleh digeneralisasi. Meskipun ada beberapa sejarah yang mencatat konflik dan pertentangan antara nasionalisme dan agama, tetapi ada juga banyak contoh di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana agama dan nasionalisme bisa berjalan seiringan dan saling memperkuat. Integrasi yang baik antara nilai-nilai agama dan nasionalisme dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam.

Sebagai sebuah negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, Indonesia telah mencoba menggabungkan nilai-nilai agama dengan semangat nasionalisme untuk membangun identitas nasional yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang mengakui keberagaman dan kebebasan beragama. Selain itu, prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang terdapat dalam Lambang Negara Garuda Pancasila menggambarkan semangat kesatuan dalam keberagaman.

Meskipun ada tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara agama dan nasionalisme, upaya untuk membangun kekuatan dari integrasi keduanya harus

terus dilakukan agar Indonesia tetap teguh sebagai bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan.

Pertentangan antar politik identitas di Indonesia dipengaruhi oleh iklim pemilihan umum (pemilu) yang sering kali mencampuradukkan persoalan keagamaan dengan persoalan negara. Hal ini menyebabkan kasus penistaan agama dan membuat kelompok agama minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Polemik ini berlanjut hingga menjadi perdebatan yang substansial mengenai pemisahan agama dari urusan politik. Proses pemilu seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menggunakan berbagai cara, bahkan agama pun menjadi korbannya.

Inilah yang menjadi pemicu perpecahan antara semangat nasionalisme dan keagamaan di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana, ditambah dengan kerakusan untuk mempertahankan kekuasaan, membuat politik identitas menjadi alat yang ampuh untuk meraih dukungan rakyat. Pengaruh media massa dalam menggiring dan membentuk opini publik mengenai semangat keberagaman dan nasionalisme telah memecahbelah kehidupan berbangsa. Padahal, tak bisa dipungkiri bahwa agama mayoritas di Indonesia sebenarnya telah lama mengamalkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, seperti pengakuan Pancasila sebagai landasan negara dan toleransi beragama dengan menghormati keberadaan agama minoritas.

Pertentangan antar politik identitas di Indonesia dipengaruhi oleh iklim pemilihan umum (pemilu) yang sering kali mencampuradukkan persoalan keagamaan dengan persoalan negara. Hal ini menyebabkan kasus penistaan agama dan membuat kelompok agama minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Polemik ini berlanjut hingga menjadi perdebatan yang substansial mengenai pemisahan agama dari urusan politik. Proses pemilu seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menggunakan berbagai cara, bahkan agama pun menjadi korbannya (Saputro, 2018).

Inilah yang menjadi pemicu perpecahan antara semangat nasionalisme dan keagamaan di Indonesia. Kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana, ditambah dengan kerakusan untuk mempertahankan kekuasaan, membuat politik identitas menjadi alat yang ampuh untuk



meraih dukungan rakyat. Pengaruh media massa dalam menggiring dan membentuk opini publik mengenai semangat keberagaman dan nasionalisme telah memecahbelah kehidupan berbangsa. Padahal, tak bisa dipungkiri bahwa agama mayoritas di Indonesia sebenarnya telah lama mengamalkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, seperti pengakuan Pancasila sebagai landasan negara dan toleransi beragama dengan menghormati keberadaan agama minoritas.

## **KESIMPULAN**

Gangguan terhadap stabilitas negara sering kali disebabkan oleh perpecahan yang muncul karena adanya kelompok-kelompok politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme. Penyebaran berita hoax, persekusi, pembatasan ruang demokrasi, dan lain bukti adanya krisis ketidakpercayaan kepada pemerintah. Harus diakui bahwa keberadaan politik identitas bukanlah menjadi faktor utama penyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, tapi merupakan dasar pondasi penting dalam membangun identitas nasionalisme bangsa. Oleh karena itu, seharusnya politik identitas di Indonesia dihadapi dengan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk membuktikan bahwa agama dan nasionalisme dapat berjalan seiring dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Tidak seharusnya kita membiarkan pertentangan antara keduanya semakin meluas dengan adanya kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda.

Dalam mengatasi perpecahan dan krisis kepercayaan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan persatuan. Kedua identitas, keagamaan dan nasionalisme, harus dilihat sebagai sumber kekuatan yang saling melengkapi, bukan sebagai sumber konflik. Dengan cara ini, Indonesia dapat membangun stabilitas yang kuat dan memperkuat integritas nasional, menghadapi tantangan yang dihadapinya dengan cara yang bijaksana dan inklusif.

**Daftar Pustaka**

- Area, U. M. (n.d.). *Apa Politik Identitas*. Fisipol. <https://fisipol.uma.ac.id/apa-itu-politik-identitas/>
- Arendt, H. (1998). *Totalitarianisme. Part There of The Origins*.
- Azra, A. (2016). *Agama dan Nasionalisme*. Republika.Co. *Republika.Co*.
- Bowie, N. (2019). The moral obligations of multinational corporations. In *Problems of international justice* (pp. 97– 113). *Routledge*, 97–113.
- Haboddin, M. (2013). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 109–126.
- Harahap, F. (2014). Politik Identitas Berbasis Agama. *Prosiding Sosiologi Konflik Dan Politik Identitas*.
- Haris, S. (n.d.). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Heryanto, A. (n.d.). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (5th ed.). PT Gramedia.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Elektoral*. Intrans Publising.
- Nasrudin, J. . & N. A. A. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022. *Hanafiyah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8(2), 36.
- Parmudi, M. (2014). *Islam dan Demokrasi di Indonesia (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)*. IAIN Walisongo.
- Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. . . *ASKETIK*, 2(2). <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>
- Sari, E. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*. 2(12).
- Shadily, H. (n.d.). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. PT Bina Aksara.
- Suparlan, P. (2014). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press.
- Syafii Maarif, A. (2013). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Democracy Project.
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- UMM, H. (n.d.). *Politik Identitas : Pemersatu yang Memecah Belah*. UMM. <https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/politik-identitas-pemersatu-yang-memecah-belah.html>

Unair. (n.d.). *Identitas dan Politik Identitas di Indonesia*. Unair News.  
<https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia>

Wahid, S. (2017). Keindonesiaan dan Keislaman. *Harian Kompas*.

Wikipedia. (2023). *Politik Identitas*. Wikipedia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_identitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_identitas)